

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BASIS LAYANAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

**R. Erman Jaya Kusuma**  
PUSAT PENDIDIKAN LATIHAN KEUANGAN ANGGARAN DAN  
PERBENDAHARAAN Jakarta  
[ermanjkusuma@yahoo.co.id](mailto:ermanjkusuma@yahoo.co.id)

## *Abstract*

*This study aims to examine and find empirical evidence by describing how much influence, either individually (partially) or jointly, the understanding of the human resources of the satker on the effect of determining the type and rate of PNBPN types, the effect of applying for approval for the use of PNBPN funds, utilization of the system information technology (IT system), and competence/quality of human resources, on the quality of PNBPN reports.*

*Questionnaires were used to collect primary data using Structural Equation Model (SEM) Analysis with Smart-PLS with structural model designs, path diagrams, and measurement models. Ordinal data filled in by 100 respondents to the work units of Ministries/Institutions that manage other PNBPN, with a list of 44 items. ). Equation model and statistical test results:*

$$Y = \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \gamma_3 X_3 + \gamma_4 X_4 + e$$

*The results of the study show that simultaneously all 4 (four) independent variables affect the quality of PNBPN management which is reflected in the PNBPN Report. Partially all independent variables have a positive and significant effect on the accuracy of the quality of PNBPN management*

**Keywords:** Law No. 9 of 2018, Compliance, Types and Tariffs of PNBPN, Use of PNBPN Funds, Information Technology Systems, HR Competence, Evaluation, DGT Development.

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris dengan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh, baik secara sendiri-sendiri (parsial) atau bersama-sama, pemahaman SDM satker terhadap pengaruh penetapan jenis dan tarif atas jenis PNBPN, pengaruh pengajuan persetujuan penggunaan dana PNBPN, pemanfaatan sistem informasi teknologi (sistem IT), dan kompetensi/kualitas SDM, terhadap kualitas laporan PNBPN.

Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data primer menggunakan Analisa Structural Equation Model (SEM) dengan Smart-PLS dengan rancangan model struktural, diagram jalur, dan model pengukuran. Data ordinal yang diisi oleh 100 responden satker Kementerian/Lembaga yang mengelola PNBPN lainnya, dengan daftar pernyataan sebanyak 44 item. ). Model ekuasi dan hasil uji statistiknya:

$$Y = \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \gamma_3 X_3 + \gamma_4 X_4 + e$$

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan seluruh 4 (empat) variabel bebas berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan PNBPN yang tercermin dalam Laporan PNBPN. Secara parsial seluruh variabel bebas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akurasi kualitas pengelolaan PNBPN

**Kata Kunci:** Undang-Undang No.9 Tahun 2018, Kepatuhan, Jenis dan Tarif PNBPN, Penggunaan Dana PNBPN, Sistem Informasi Teknologi, Kompetensi SDM, Evaluasi, Pembinaan DJA.

## **PENDAHULUAN**

APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal terus didorong agar efektif dalam merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, serta mampu mendukung secara konsisten pencapaian target pembangunan yang optimal. Untuk mendukung hal ini, maka APBN perlu dijaga agar tetap sehat dan berkesinambungan melalui upaya optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas dan efisiensi belanja serta menjaga agar defisit tetap pada level yang aman. Pengelolaan APBN diharapkan mampu mendorong fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi secara optimal agar mampu menopang pembangunan yang berkelanjutan dan dalam rangka mewujudkan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dalam perspektif jangka pendek, menengah dan panjang. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menstimulasi perekonomian agar mampu tumbuh secara optimal sehingga mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan, yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan proses yang cukup panjang melalui pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan. Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menstimulasi perekonomian, diperlukan ruang fiskal yang cukup memadai. Ruang fiskal tersebut akan memadai jika Pemerintah mempunyai pendapatan yang memadai juga, baik yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sumber-sumber pendapatan tersebut harus dikelola secara optimal agar dapat digunakan untuk membiayai belanja negara yang dari tahun ke tahun kebutuhannya semakin besar. Sejalan dengan hal tersebut, program ekstensifikasi dan intensifikasi pendapat negara perlu terus digali dan ditingkatkan. Potensi pendapatan negara yang selama ini belum optimal juga harus digali agar kontribusinya terhadap pendapatan negara semakin signifikan.

Sebagaimana banyak diterapkan di berbagai negara, Penerimaan Perpajakan menjadi andalan utama Pemerintah dalam membiayai pembangunan. Namun, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menjadikan PNBP sebagai salah satu sumber pendapatan yang cukup signifikan berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan. PNBP terdiri dari Penerimaan yang berasal dari Sumber Daya Alam yang terdiri dari Minyak dan Gas, Non Minyak dan Gas (Pertambangan Umum, Kehutanan dan Perikanan); Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; PNBP lainnya dan Penerimaan BLU. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi tercapai atau tidaknya target PNBP yang telah ditetapkan, baik faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu Pemerintah berupaya untuk terus memperbaiki tata kelola PNBP agar mampu menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan.

Berdasarkan data realisasi APBN dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 (*audited*, yang dilaksanakan oleh BPK RI), menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan PNBP cenderung meningkat pada tahun 2016 - 2018, sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, porsi PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Migas, menurun dibandingkan tahun 2018. Demikian pula porsi PNBP Lainnya, menurun pada tahun 2019 dan tahun 2020, walaupun dari tahun 2016 ke tahun 2018 mengalami kenaikan, bahkan kenaikannya dapat melebihi PNBP Sumber

Daya Alam (SDA) Migas. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mengingat kinerja PNBP sangat bergantung pada *volatilitas* harga komoditas minyak (*Indonesian Crude Price*) maupun lifting minyak dan gas. Namun pada sisi lain, memunculkan harapan bahwa pengelolaan PNBP yang **berbasis layanan** menunjukkan capaian yang menggembirakan. Untuk itu, perlu dilakukan terobosan ke depan agar **PNBP Lainnya** yang **berbasis layanan** dapat menjadi sumber pendapatan yang mampu menopang keberlanjutan PNBP di masa mendatang.

Berdasarkan data dilihat komposisi dari Pendapatan PNBP secara rata-rata dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah; (1) SDA Migas 25,54%, (2) SDA Nonmigas 8,61%, (3) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND/BUMN) 15,68%, (4) PNBP Lainnya 34,79%, dan (5) Badan Layanan Umum (BLU) 15,37%. Salah satu poin penting yang dapat kita peroleh dari data tersebut di atas adalah, bahwa peranan **PNBP Lainnya** (basis layanan) dalam beberapa tahun terakhir mampu menggeser posisi dari penerimaan **Sumber Daya Alam**, khususnya yang berasal dari Migas yang selama ini mendominasi PNBP.

Terhadap proporsi PBNB, maka perlu dilakukan upaya optimalisasi PNBP melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi maupun penyempurnaan payung hukum dan IT. Sejalan dengan berkurangnya sumber daya alam Indonesia, sudah saatnya Pemerintah melakukan upaya pengalihan fokus, yang semula mengandalkan PNBP yang berasal dari pengelolaan SDA menjadi lebih konsentrasi pada peningkatan penerimaan yang bersumber dari Non-SDA, khususnya yang berasal dari layanan Kementerian/ Lembaga.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, PNBP saat ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di samping penerimaan perpajakan. Namun demikian, kontribusi PNBP dinggap belum optimal. Hal ini disebabkan dalam pengelolaan PNBP masih terdapat beberapa permasalahan dan kelemahan. Permasalahan tersebut tercermin dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan - RI (BPK-RI) pada beberapa Kementerian/ Lembaga tahun 2020 dan tahun – tahun sebelumnya, yaitu masih banyaknya temuan terkait dengan pengelolaan PNBP, antara lain:

1. PNBP terlambat/belum disetor ke Kas Negara;
2. Pungutan PNBP yang belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung;
3. PNBP kurang dipungut/belum dipungut walaupun sudah ada dasar hukumnya;
4. Pungutan PNBP yang telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung;
5. Pungutan PNBP melebihi tarif Peraturan Pemerintah dan digunakan digunakan langsung untuk operasional;
6. Pengelolaan piutang PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) belum sesuai dengan ketentuan;
7. Permasalahan lainnya terkait PNBP.

Permasalahan di atas, memperkuat alasan mengapa perlu dilakukan segera pembenahan pengelolaan PNBP, agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap Penerimaan Negara.

Melihat dan mencermati hal-hal tersebut di atas, maka penulis bermaksud melakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis layanan. Sedangkan

pengelolaan PNBP SDA MIGAS, SDA Non MIGAS, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan (KND), dan Badan Layanan Umum (BLU) sudah mempunyai peraturan ketentuan tersendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas PNBP tersebut antara lain; payung hukum (penetapan jenis dan tarif serta pengajuan ijin penggunaan dana PNBP), penggunaan sistem informasi teknologi (*IT system*), serta Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini untuk menjawab temuan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. Data temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia (BPK RI) terkait pengelolaan PNBP Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

## KAJIAN LITERATUR

Wahyu Utomo (2019), Pusat Kebijakan APBN - Badan Kebijakan Fiskal. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis realisasi PNBP dalam mendukung kesinambungan fiskal dan merumuskan strategi optimalisasi PNBP yang berkelanjutan di masa mendatang. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2005 s.d. 2018 yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan berbagai referensi dari lembaga kajian dan lembaga internasional. Adapun metode penelitiannya adalah dengan pendekatan diskriptif kuantitatif dan kualitatif serta studi literatur (*benchmarking* ke beberapa negara). Berdasarkan hasil pengolahan data, penelitian menunjukkan bahwa secara umum pencapaian Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam mendukung keberlanjutan fiskal masih menghadapi tantangan, sehingga memerlukan strategi untuk mendorong optimalisasi PNBP yang berkelanjutan agar PNBP ke depan lebih optimal. Strategi untuk menjaga kesinambungan PNBP dilakukan, utamanya melalui penguatan PNBP yang berbasis pelayanan dengan tetap memperhatikan kualitas dan keterjangkauan publik. Agung Dinarjito (2017), Politeknik Keuangan Negara STAN-Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu sumber penerimaan penting selain dari penerimaan pajak. Karena itu, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi sangat penting. Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat membuat Kementerian/Lembaga mendapat opini *disclaimer*, salah satunya adalah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). Temuan pada Laporan Keuangan LPP TVRI PNBP adalah pungutan tanpa dasar hukum pada penerimaan layanan siaran dan nonsiaran (jasinonsi) dan digunakan segera setelah menerima jasinonsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada LPP TVRI tentang bagaimana mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk menghindari opini *disclaimer* dari BPK. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis masalah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tujuan memberikan rekomendasi atau saran kepada LPP TVRI sehingga di masa depan temuan-temuan tersebut tidak diulang. Berdasarkan hasil diskusi, LPP TVRI harus mengelola tanda terima PNBP menggunakan aturan yang berkaitan dengan keuangan negara (aturan PNBP). Oleh karena itu, penulis menyarankan agar LPP TVRI segera mengajukan proposal Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kemudian mengajukan permohonan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Menteri Keuangan setelah Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan oleh Presiden.

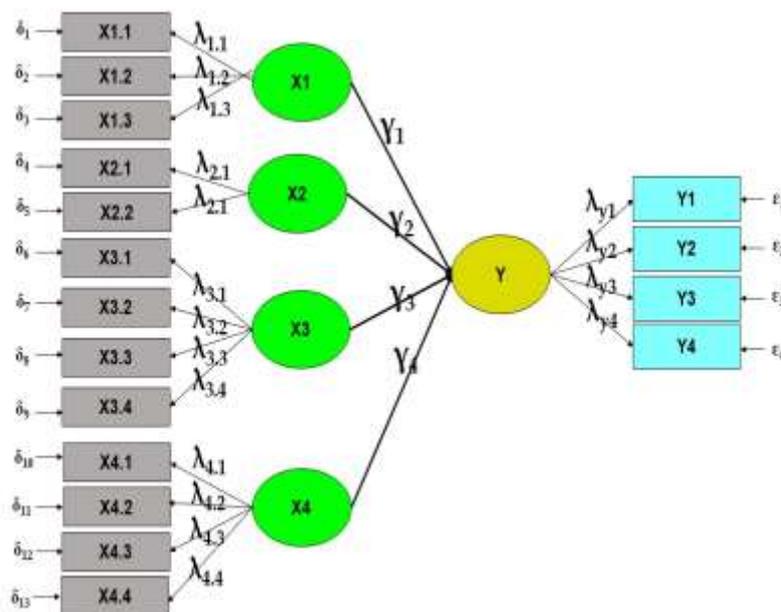
**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam **penelitian kuantitatif** yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan (Indriantoro dan Supomo, 2011), penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Dari jenis penelitian ini, termasuk dalam penelitian *causal comparative*, untuk menyelidiki kemungkinan hubungan antara variabel satu dengan lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabel yang akan diteliti, yaitu antara **variabel independen** berupa (i) pengaruh penetapan jenis dan tarif PNBP (**X1**), (ii) pengaruh pengajuan ijin penggunaan dana PNBP (**X2**), (iii) pengaruh penggunaan/pemanfaatan system informasi teknologi (IT Sistem) (**X3**), (iv) pengaruh kompetensi kualitas sumber daya manusia (**X4**), (v) dengan **variabel dependen** berupa kualitas penerimaan negara bukan pajak (**Y**). Penelitian ini dilakukan pada Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengelola PNBP di pusat dan memiliki Satuan Kerja (Satker) baik di pusat ataupun wilayah/daerah. Target awal yang disampaikan dalam pengisian dari responden sebanyak 26 Kementerian/Lembaga, namun demikian pengisian hanya dilakukan oleh 19 responden K/L yang mengisi/merespon atas kuisioner tersebut. Meskipun demikian, jumlah sampel yang memasukkan data lebih besar, dari target 91 (sembilan puluh satu) ternyata yang menyampaikan adalah 100 responden.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif dan analisis Struktural Equation Model dengan Smart-PLS.

Dari operasional variabel, maka dapat dilakukan langkah pertama sampai dengan ketiga dalam **SEM**, yaitu membuat rancangan model struktural, model pengukuran dan diagram jalur sebagai berikut:

**Gambar Model Struktural**



Model Struktural

$$Y = \gamma_1 X_1 + \gamma_2 X_2 + \gamma_3 X_3 + \gamma_4 X_4 + e$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

**Tabel Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Y	A1	0.757	0.1966	Valid
	A2	0.880		Valid
	A3	0.851		Valid
	A4	0.859		Valid
	A5	0.858		Valid
	A6	0.911		Valid
	A7	0.877		Valid
	A8	0.711		Valid
	A9	0.887		Valid
	A10	0.839		Valid
	A11	0.910		Valid
X1	B1	0.835		Valid
	B2	0.865		Valid
	B3	0.794		Valid
	B4	0.895		Valid
	B5	0.845		Valid
	B6	0.817		Valid
	B7	0.768		Valid
	B8	0.833		Valid
	B9	0.804		Valid
	B10	0.900		Valid
	B11	0.702		Valid
X2	C1	0.923		Valid
	C2	0.931		Valid
	C3	0.932		Valid
	C4	0.917		Valid
X3	D1	0.783		Valid
	D2	0.854		Valid
	D3	0.802		Valid
	D4	0.900	Valid	
	D5	0.911	Valid	
	D6	0.905	Valid	
	D7	0.840	Valid	
	D8	0.890	Valid	
X4	E1	0.922	Valid	
	E2	0.912	Valid	
	E3	0.864	Valid	
	E4	0.916	Valid	
	E5	0.910	Valid	

**Tabel Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
	E6	0.932		Valid
	E7	0.883		Valid
	E8	0.897		Valid
	E9	0.870		Valid
	E10	0.840		Valid

Sumber: Data primer diolah 2021

Dari hasil pengujian validitas pada tabel di atas, kuesioner yang berisi dari 3 variabel ini ada 44 pernyataan dalam kuesioner yang telah diisi oleh 100 responden pada penelitian ini. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tahu r tabel-nya terlebih dahulu. Rumus dari r tabel adalah  $df = N-2$  jadi  $100-2 = 98$ , sehingga  $r\ tabel = 0,1966$ . Dari hasil perhitungan validitas pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa  $r\ hitung > r\ tabel$  artinya seluruh pernyataan sudah valid menggambarkan variabel penelitian.

Penelitian ini harus dilakukannya uji reliabilitas untuk mengukur konsisten atau tidak kuesioner dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh tidaknya variabel X dengan variabel Y. Sebelum dilakukannya pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu alpha sebesar 0,60. Variabel yang dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut lebih besar dari  $> 0,60$ , jika lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena  $< 0,60$ . Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel Hasil uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha
<b>Y</b>	<b>0.960</b>
<b>X1</b>	<b>0.950</b>
<b>X2</b>	<b>0.944</b>
<b>X3</b>	<b>0.947</b>
<b>X4</b>	<b>0.972</b>

Sumber: Data primer diolah 2021

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y) dapat dilihat bahwa *cronbach's alpha* pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu  $0,960 > 0,60$ , hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y) dinyatakan reliabel. Variabel Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN (X1) dapat dilihat bahwa *cronbach's alpha* pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu  $0.950 > 0,60$ , hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN (X1) dinyatakan reliabel. Variabel Pengajuan Ijin Penggunaan Dana PNBPN (X2) dapat dilihat bahwa *cronbach's alpha* pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu

0.944 > 0,60, hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam Pengajuan Ijin Penggunaan Dana PNBPN (X2) dinyatakan reliabel. Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT) (X3) dapat dilihat bahwa *cronbach's alpha* pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu 0.947 > 0,60, hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT) (X3) dinyatakan reliabel. Variabel Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia (X4) dapat dilihat bahwa *cronbach's alpha* pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu 0.972 > 0,60, hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia (X4) dinyatakan reliabel.

Hasil sebaran frekuensi jawaban responden terhadap persepsi dari 11 indikator pernyataan yang menggambarkan Kualitas Pengelolaan PNBPN yang Tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pernyataan yang memiliki rata-rata tertinggi adalah Setiap pungutan kepada Wajib Bayar memiliki dasar hukum pemungutan berupa PP/Peraturan Menteri Keuangan dengan nilai rata-rata 4.33 dan pernyataan Setiap pungutan disetorkan seluruhnya (tanpa potongan) terlebih dahulu ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi dengan nilai rata-rata 4.33. Nilai rata-rata terendah ada pada pernyataan PNBPN dari wajib bayar disetorkan langsung ke Kas Negara melalui bank/pos persepsi selambat-lambatnya di akhir hari kerja dengan rata-rata sebesar 4.09. Hasil keseluruhan menunjukkan nilai rata-rata masih tinggi diatas 4 artinya persepsi seluruh responden terhadap variabel Kualitas Pengelolaan PNBPN yang Tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak **sudah baik**.

Hasil sebaran frekuensi jawaban responden terhadap persepsi dari 11 indikator pernyataan yang menggambarkan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN. Pernyataan yang memiliki rata-rata tertinggi adalah Pemungutan yang dilakukan berdasarkan regulasi tentang tarif dan jenis PNBPN berupa Peraturan Pemerintah (PP)/Peraturan Menteri Keuangan dengan nilai **rata-rata 4.36** dan pernyataan Tarif atas jenis PNBPN yang berlaku disusun dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan nilai **rata-rata 4.32**. Nilai rata-rata terendah ada pada pernyataan Tarif atas jenis PNBPN untuk Pelayanan, Penggunaan Barang Milik Negara (BMN), dan Hak Negara Lainnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam hal tarif bersifat volatile dan dalam kebutuhan mendesak dengan **rata-rata sebesar 3.99**. Hasil keseluruhan menunjukkan nilai rata-rata masih tinggi diatas 4 **artinya** persepsi seluruh responden terhadap variabel Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN **sudah baik**.

Hasil sebaran frekuensi jawaban responden terhadap persepsi dari 4 indikator pernyataan yang menggambarkan Pengajuan Persetujuan Penggunaan Dana PNBPN. Pernyataan yang memiliki rata-rata tertinggi adalah Usulan Penggunaan Dana PNBPN telah dilengkapi data dan dokumen yang menggambarkan penggunaan PNBPN untuk unit-unit kerja di lingkungan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan PNBPN, dan/atau peningkatan kualitas pengelolaan PNBPN, dan/atau kegiatan lainnya, dan/atau optimalisasi PNBPN **nilai rata-rata 4.25** dan pernyataan Instansi pengelola PNBPN dapat mengusulkan penggunaan dana PNBPN yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan dengan **nilai rata-rata 4.24**. Nilai rata-rata terendah ada pada pernyataan Usulan penggunaan dana PNBPN yang diajukan telah mempertimbangkan alokasi antar unit dan ketersediaan anggaran dari sumber dana lain (RM, PHLN, SBSN) dengan **rata-rata sebesar 4.17**. Hasil keseluruhan menunjukkan nilai rata-rata masih tinggi diatas 4 **artinya** persepsi seluruh responden terhadap variabel Pengajuan Ijin/Persetujuan Penggunaan Dana PNBPN **sudah baik**.

Hasil sebaran frekuensi jawaban responden terhadap persepsi dari 8 indikator pernyataan yang menggambarkan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT). Pernyataan yang memiliki rata-rata tertinggi adalah Sistem Informasi memfasilitasi penyetoran PNBPN baik dari wajib bayar maupun bendahara dilaksanakan secepat-cepatnya ke Kas Negara dengan **nilai rata-rata 4.32** dan pernyataan Proses bisnis pembayaran dan penyetoran PNBPN ke Kas Negara melalui SIMPONI/sistem informasi yang tersedia dapat dilaksanakan dengan cepat dan tidak dibebankan tambahan biaya dengan **nilai rata-rata 4.29**. Nilai rata-rata terendah ada pada pernyataan Sistem informasi yang tersedia menyediakan data yang andal untuk pelaporan PNBPN dengan **nilai rata-rata sebesar 4.10**. Hasil keseluruhan menunjukkan nilai rata-rata masih tinggi diatas 4 **artinya** persepsi seluruh responden terhadap variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT) **sudah baik**.

Hasil sebaran frekuensi jawaban responden terhadap persepsi dari 10 indikator pernyataan yang menggambarkan Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia. Pernyataan yang memiliki rata-rata tertinggi adalah Pimpinan aktif mengingatkan agar seluruh PNBPN disetor ke Kas Negara tepat pada waktunya dengan **nilai rata-rata 4.29** dan pernyataan Adanya arahan pimpinan terkait untuk memastikan setiap pemungutan memiliki dasar hukum dengan **nilai rata-rata 4.18**. Nilai rata-rata terendah ada pada pernyataan Staf yang bertugas menyusun Laporan PNBPN telah mendapatkan pelatihan memadai untuk dapat menunjang kemampuan bekerja di bidang PNBPN dengan **nilai rata-rata sebesar 3.90**. Hasil keseluruhan menunjukkan nilai rata-rata masih tinggi diatas 4 **artinya** persepsi seluruh responden terhadap variabel untuk Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia **sudah baik**.

Model penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)* dan dibantu dengan software SmartPLS 2.0. PLS merupakan salah satu metode alternatif *Structural Equation Modeling (SEM)* yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada hubungan diantara variabel yang sangat kompleks tetapi ukuran sampel data kecil (30-100 sampel) dan memiliki asumsi non parametrik, artinya bahwa data tidak mengacu pada salah satu distribusi tertentu (Yamin dan Kurniawan, 2009).

### 1. Convergent Validity

*Convergent Validity* dilakukan dengan melihat **item reliability (indikator validitas)** yang ditunjukkan oleh **nilai loading factor**. **Loading factor** adalah angka yang menunjukkan korelasi antara skor suatu item pertanyaan dengan skor indikator konstruk indikator yang mengukur konstruk tersebut. Nilai loading factor lebih besar 0,7 dikatakan valid. Namun, menurut Hair et al. (1998) untuk pemeriksaan awal dari matriks loading factor adalah kurang lebih 0,3 dipertimbangkan telah memenuhi level minimal, dan untuk loading factor kurang lebih 0,4 dianggap lebih baik, dan untuk **loading factor lebih besar 0,5 secara umum dianggap signifikan**. Dalam penelitian ini batas loading factor yang digunakan sebesar 0,5. Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan SmartPLS 2.0, menunjukkan hasil sebagai berikut;

*Tabel 4.9 Hasil Convergen Validity*

No	Indikator	Loading Factor	Keterangan
X1.1	Fungsi pemungutan PNBP dan pendekatan penetapan tarif	0.933	Valid
X1.2	Obyek, Jenis, dan Tarif atas Jenis PNBP	0.948	Valid
X1.3	Pertimbangan penetapan tarif atas jenis PNBP	0.886	Valid
X2.1	Kewenangan Pihak Pengguna Dana PNBP	0.968	Valid
X2.2	Data dan Dokumen untuk Penilaian	0.964	Valid
X3.1	Efisien	0.868	Valid
X3.2	Aman	0.913	Valid
X3.3	Sederhana	0.959	Valid
X3.4	Mudah digunakan	0.898	Valid
X4.1	Pengetahuan	0.951	Valid
X4.2	Sikap	0.966	Valid
X4.3	Keterampilan	0.912	Valid
X4.4	Komitmen Pimpinan	0.927	Valid
Y1	PNBP kurang dipungut/tidak dipungut	0.898	Valid
Y2	PNBP terlambat disetor/belum disetor	0.919	Valid
Y3	PNBP tdk dipungut sesuai peraturan pemerintah dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN dan dipungut tanpa dasar hukum dan digunakan langsung	0.946	Valid
Y4	Perencanaan PNBP kurang mencerminkan potensi PNBP	0.942	Valid

Sumber: Hasil olah Smart-PLS 2

Dari hasil pengolahan data dengan SmartPLS yang ditunjukkan pada Tabel tersebut di atas, bahwa seluruh indikator pada masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki **nilai loading factor yang lebih besar dari 0,50 dan dikatakan valid.**

## 2. Discriminant Validity

*Discriminant Validity* dilakukan dengan cara melihat nilai *cross loading* pengukuran konstrak. Nilai *cross loading* menunjukkan besarnya korelasi antara setiap konstrak dengan indikatornya dan indikator dari konstrak blok lainnya. Suatu model pengukuran memiliki *discriminant validity* yang baik apabila korelasi antara konstrak dengan indikatornya **lebih tinggi daripada korelasi dengan indikator dari konstrak blok lainnya**, dengan hasil sebagai berikut;

Tabel 4.10 Cross Loadings

Variabel	X1	X2	X3	X4	Y
X1.1	<b>0.933</b>	0.748	0.756	0.765	0.837
X1.2	<b>0.948</b>	0.735	0.762	0.788	0.810
X1.3	<b>0.886</b>	0.717	0.733	0.646	0.762
X2.1	0.778	<b>0.968</b>	0.818	0.757	0.861
X2.2	0.757	<b>0.964</b>	0.825	0.749	0.819

Variabel	X1	X2	X3	X4	Y
X3.1	0.744	0.759	<b>0.868</b>	0.706	0.804
X3.2	0.704	0.718	<b>0.913</b>	0.679	0.714
X3.3	0.800	0.857	<b>0.959</b>	0.798	0.852
X3.4	0.700	0.748	<b>0.898</b>	0.719	0.708
X4.1	0.751	0.728	0.747	<b>0.951</b>	0.795
X4.2	0.765	0.742	0.780	<b>0.966</b>	0.820
X4.3	0.666	0.640	0.640	<b>0.912</b>	0.715
X4.4	0.797	0.805	0.821	<b>0.927</b>	0.857
Y1	0.772	0.817	0.804	0.802	<b>0.898</b>
Y2	0.802	0.758	0.743	0.781	<b>0.919</b>
Y3	0.827	0.809	0.790	0.761	<b>0.946</b>
Y4	0.827	0.838	0.813	0.811	<b>0.942</b>

Sumber: Hasil olah Smart-PLS 2

Dari hasil **cross loading** pada Tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa nilai korelasi konstruk dengan indikatornya lebih besar daripada nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Dengan demikian bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki **discriminant validity** yang baik, **dimana indikator pada blok indikator konstruk tersebut lebih baik daripada indikator di blok lainnya.**

Evaluasi selanjutnya, yaitu dengan membandingkan **nilai akar AVE** dengan korelasi antar konstruk. Hasil yang direkomendasikan adalah **nilai akar AVE harus lebih tinggi dari korelasi antar konstruk** (Yamin dan Kurniawan, 2011). Model memiliki **discriminant validity** yang lebih baik apabila akar kuadrat AVE untuk masing-masing konstruk lebih besar dari korelasi antara dua konstruk di dalam model. Nilai AVE yang baik disyaratkan memiliki nilai lebih besar dari 0,50. Dalam penelitian ini, **nilai AVE dan akar kuadrat AVE** untuk masing-masing konstruk dapat ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 4.11 AVE

Variabel	AVE	Akar AVE	Keterangan
X1	0.8517	0.9229	Valid
X2	0.9330	0.9659	Valid
X3	0.8285	0.9102	Valid
X4	0.8822	0.9392	Valid
Y	0.8585	0.9266	Valid

Sumber: Hasil olah Smart-PLS 2

Berdasarkan Tabel 4.11 semua konstruk menunjukkan nilai AVE yang lebih besar dari 0,50 yaitu dengan nilai **terkecil 0.8285** untuk **variabel X3** dan **terbesar 0.9330** yaitu **X2**. Nilai tersebut sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan batas **nilai minimum AVE** yang ditentukan yaitu **0,50**.

### 3. Composite Reliability (CR)

*Outer model* selain diukur dengan menilai *convergent validity* dan *discriminant validity* juga dapat dilakukan dengan melihat reliabilitas konstruk atau variabel laten yang diukur dengan nilai *composite reliability*. Konstruk **dinyatakan reliabel jika *composite reliability* mempunyai nilai > 0.7**, maka konstruk **dinyatakan reliabel**. Hasil *output SmartPLS* untuk nilai *composite reliability* dapat ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut;

**Tabel 4.12 Nilai Composite Reliability (CR)**

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
X1	0.9451	Reliable
X2	0.9654	Reliable
X3	0.9507	Reliable
X4	0.9677	Reliable
Y	0.9604	Reliable

Sumber: Hasil olah Smart-PLS 2

Dari hasil *output SmartPLS* pada Tabel tersebut di atas menunjukkan nilai *composite reliability* untuk semua konstruk **berada** diatas nilai 0,70. Dengan nilai yang dihasilkan tersebut, semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang telah disyaratkan.

### 4. Analisis Variant ( $R^2$ ) atau Uji Determinasi

*Analisis Variant ( $R^2$ )* atau Uji Determinasi yaitu untuk mengetahui besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tersebut, nilai dari koefisien determinasi dapat ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut;

**Tabel 4.13 Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )**

Variabel	R Square
Y	0.8720

Sumber: Hasil olah Smart-PLS 2

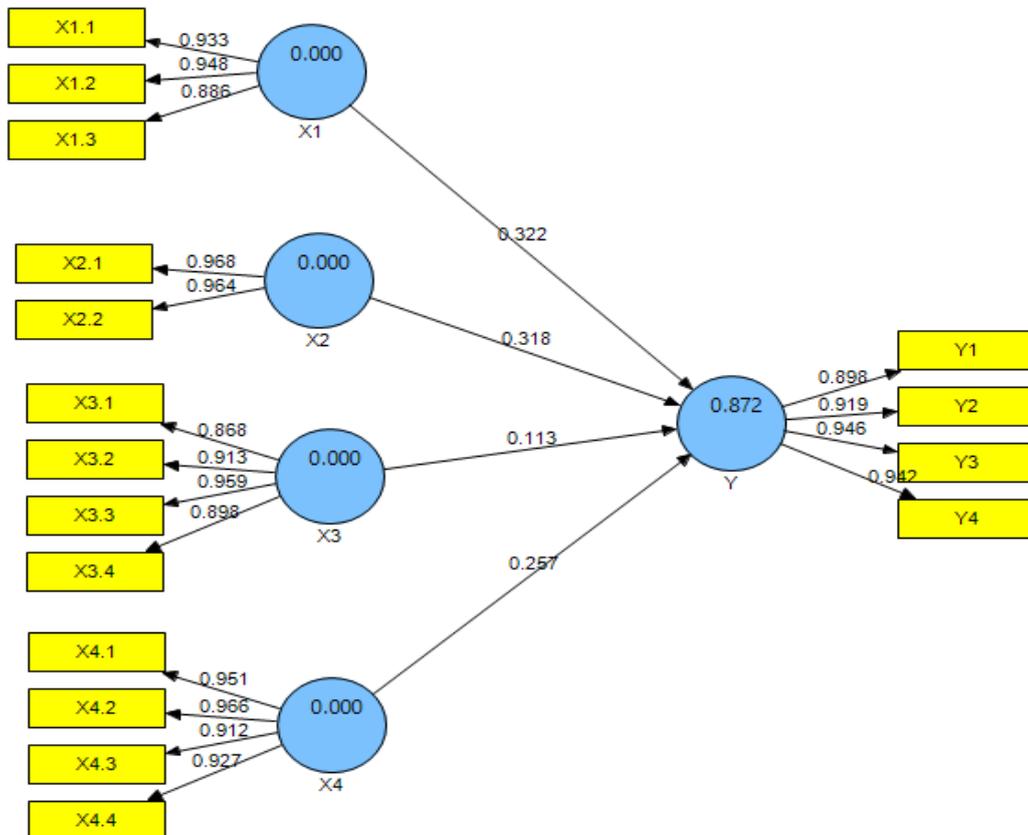
Berdasarkan nilai **r-square** pada Tabel 4.13, menunjukkan bahwa **seluruh variabel eksogen (X1, X2, X3 dan X4)** mampu menjelaskan **variabilitas konstruk Y** sebesar **87.20%**, dan **sisanya** sebesar **12.91%** diterangkan oleh konstruk lainnya diluar yang diteliti dalam penelitian ini.

#### 4.4 Pengujian Hipotesis

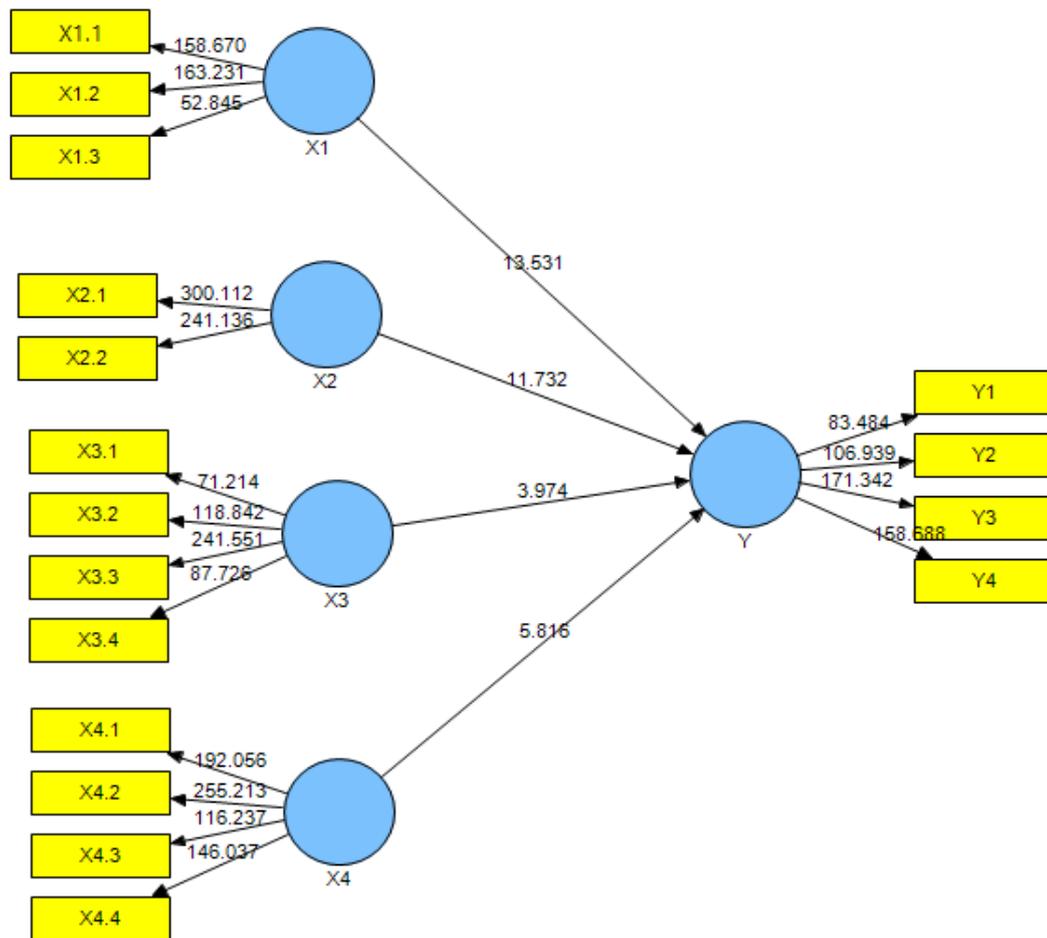
Pengujian Hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian *Inner Model* (model struktural) yang meliputi *output r-square*, **koefisien parameter** dan **t-statistik**. Untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar **konstrak**, **t-statistik**, dan **p-values**. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SmartPLS (*Partial Least Square*) 3.0. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat

dari hasil *bootstrapping*. *Rules of thumb* yang digunakan pada penelitian ini adalah **t-statistik >1,96** dengan **tingkat signifikansi p-value 0,05 (5%)** dan **koefisien beta bernilai positif**. Nilai pengujian hipotesis penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel dan untuk hasil model penelitian ini dapat digambarkan seperti tampak pada Gambar berikut ini:

Gambar 4.7 Standardized Loading Factor



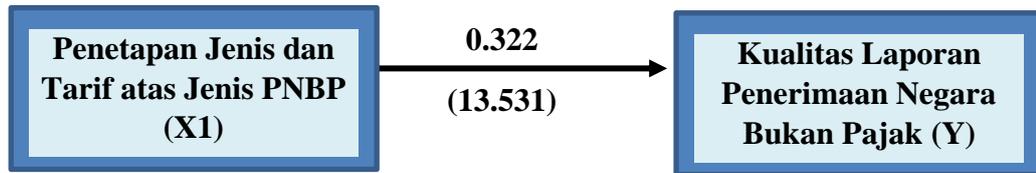
Gambar 4.8 T Hitung



Tabel 4.14 Uji Hipotesis

Hipotesis		SLF	T Hitung	Kesimpulan
<b>H1</b>	<b>X1 → Y</b>	<b>0.322</b>	<b>13.531</b>	Nilai t hitung 13.531 lebih besar dari t tabel (1,96) dan koefisien sebesar 0.322 artinya terdapat pengaruh yang signifikan X1 terhadap Y
<b>H2</b>	<b>X2 → Y</b>	<b>0.318</b>	<b>11.732</b>	Nilai t hitung 11.732 lebih besar dari t tabel (1,96) dan koefisien sebesar 0.318 artinya terdapat pengaruh yang signifikan X2 terhadap Y
<b>H3</b>	<b>X3 → Y</b>	<b>0.113</b>	<b>3.974</b>	Nilai t hitung 3.974 lebih besar dari t tabel (1,96) dan koefisien sebesar 0.113 artinya terdapat pengaruh yang signifikan X3 terhadap Y
<b>H4</b>	<b>X4 → Y</b>	<b>0.257</b>	<b>5.816</b>	Nilai t hitung 5.816 lebih besar dari t tabel (1,96) dan koefisien sebesar 0.257 artinya terdapat pengaruh yang signifikan X4 terhadap Y

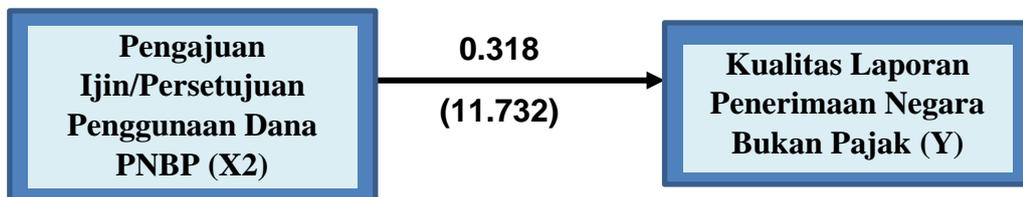
1. Uji Pengaruh Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP (X1) Terhadap Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y)



Hasil uji hipotesis **pertama** yaitu pengaruh Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP (X1) terhadap Kualitas Pengelolaan PNBP yang tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y) menghasilkan **nilai koefisien sebesar 0.322 (positif)** dan **t hitung 13.531**. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel 1.96 artinya terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP (X1) terhadap Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). Semakin baik persepsi pegawai terhadap Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP (X1) akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y).

Hasil dari nilai loading indikator yaitu **X1.1, X1.2, dan X1.3** menunjukkan pengaruh yang searah terhadap peningkatan Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). **Indikator X1.2** yaitu **Obyek, Jenis, dan Tarif atas Jenis PNBP** memiliki pengaruh terkuat dengan **nilai loading faktor 0.948 sangat kuat dan positif**. Pengaruh terkuat kedua adalah **X1.1** yaitu **Fungsi pemungutan PNBP dan pendekatan penetapan tarif** dengan **nilai loading faktor 0.933** dan yang terendah adalah **X1.3** yaitu PNBP dipungut sesuai peraturan pemerintah dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN dan dipungut tanpa dasar hukum dan digunakan langsung dengan **nilai loading faktor 0.886**.

2. Uji Pengaruh Pengajuan Persetujuan Penggunaan Dana PNBP (X2) Terhadap kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y)



Hasil uji hipotesis kedua yaitu pengaruh Pengajuan Ijin Penggunaan Dana PNBP (X2) terhadap Kualitas Pengelolaan PNBP yang tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y) menghasilkan **nilai koefisien sebesar 0.318 (positif)** dan **t hitung 11.732**. Karena **nilai t hitung lebih besar dari t tabel 1.96** artinya **terdapat pengaruh yang signifikan dan positif** antara Pengajuan Ijin/Persetujuan Penggunaan Dana PNBP (X2) terhadap Kualitas Pengelolaan PNBP yang tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). Semakin baik persepsi pegawai terhadap Pengajuan Ijin/Persetujuan Penggunaan Dana PNBP (X2) akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y).

Hasil dari nilai loading indikator yaitu **X2.1** dan **X2.2** menunjukkan pengaruh yang searah terhadap peningkatan Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (**Y**). **Indikator X2.1** yaitu **Kewenangan Pihak Pengguna Dana PNB** dengan **nilai loading faktor 0.968** sangat kuat dan positif. Pengaruh terkuat kedua adalah **X2.2** yaitu **Data dan Dokumen untuk Penilaian** dengan **nilai loading factor 0.964**.

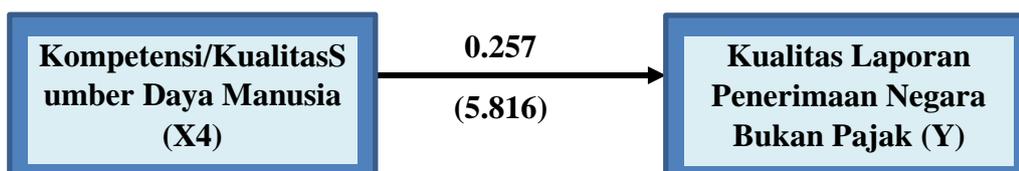
**3. Uji Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT) (X3) Terhadap kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y)**



Hasil uji hipotesis ketiga yaitu pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT) (**X3**) terhadap Kualitas Pengelolaan PNB yang tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (**Y**) menghasilkan **nilai koefisien** sebesar **0.113 (positif)** dan **t hitung 3.974**. Karena **nilai t hitung** lebih besar dari **t tabel 1.96** artinya **terdapat pengaruh yang signifikan dan positif** antara **Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT) (X3)** terhadap Kualitas Pengelolaan PNB yang tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (**Y**). Semakin baik persepsi pegawai terhadap Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT) (**X3**) akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (**Y**).

Hasil dari nilai loading indikator yaitu **X3.1, X3.2, X3.3** dan **X3.4** menunjukkan pengaruh yang searah terhadap peningkatan Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (**Y**). **Indikator X3.3** yaitu **Sederhana (Simple)** dengan **nilai loading faktor 0.959** sangat kuat dan positif. Pengaruh terkuat kedua adalah **X3.2** yaitu **Aman (Safe)** dengan **nilai loading factor 0.913**. Dan indikator **X3.1** yaitu **Efisien (efficient)** merupakan **nilai loading terendah 0.868**.

**4. Uji Pengaruh Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia (X4) Terhadap kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y).**



Hasil uji hipotesis keempat yaitu pengaruh Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia (**X4**) terhadap **Kualitas Pengelolaan PNB** yang tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (**Y**) menghasilkan **nilai koefisien sebesar 0.257 (positif)** dan **t hitung 5.816**. Karena **nilai t hitung** lebih besar dari **t tabel 1.96** artinya **terdapat pengaruh yang signifikan dan positif** antara **Kompetensi/Kualitas Sumber**

Daya Manusia (X4) terhadap Kualitas Pengelolaan PNBPN yang tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). Semakin baik persepsi pegawai terhadap Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia (X4) akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y)

Hasil dari nilai loading indikator yaitu X4.1, X4.2, X4.3, dan X4.4 menunjukkan pengaruh yang searah terhadap peningkatan Kualitas Pengelolaan PNBPN yang tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). **Indikator X4.2** yaitu **Sikap** dengan **nilai loading faktor 0.966 sangat kuat dan positif**. Pengaruh **terkuat kedua** adalah **X4.1** yaitu **Pengetahuan** dengan **nilai loading faktor 0.951**. Dan **indikator X4.3** yaitu **Keterampilan** merupakan **nilai loading terendah 0.912**.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan penelitian dengan judul “**Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Basis Layanan**” sebagai berikut:

Hasil uji statistik berdasarkan *model struktural equation model (SEM)* menggunakan data hasil kuesioner adalah:

1. Hasil pengaruh Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN (X1) terhadap Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y) **menghasilkan nilai koefisien** sebesar **0.322 (positif)** dan **t hitung 13.531**. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel 1.96 artinya terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN (X1) terhadap Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). Semakin baik persepsi pegawai terhadap Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN (X1) akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). Sehingga hasil hipotesa pengaruh positif dan signifikan **Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN (X1) terhadap Kualitas Pengelolaan PNBPN yang tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y) diterima**.
2. Hasil pengaruh Pengajuan Ijin Penggunaan Dana PNBPN (X2) terhadap Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y) **menghasilkan nilai koefisien** sebesar **0.318 (positif)** dan **t hitung 11.732**. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel 1.96 artinya terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Pengajuan Ijin Penggunaan Dana PNBPN (X2) terhadap Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). Semakin baik persepsi pegawai terhadap Pengajuan Ijin Penggunaan Dana PNBPN (X2) akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). Sehingga hasil hipotesa pengaruh positif dan signifikan **Pengajuan Ijin Penggunaan Dana PNBPN (X2) terhadap Kualitas Pengelolaan PNBPN yang tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y) diterima**.
3. Hasil uji pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT) (X3) terhadap Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y) **menghasilkan nilai koefisien** sebesar **0.113 (positif)** dan **t hitung 3.974**. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel 1.96 artinya terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT) (X3) terhadap Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). Semakin baik persepsi pegawai terhadap Pemanfaatan Sistem

Informasi Teknologi (Sistem IT) (X3) akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). Sehingga hasil hipotesa pengaruh positif dan signifikan **Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT) (X3)** terhadap **Kualitas Pengelolaan PNBPN yang tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y) diterima.**

4. Hasil uji pengaruh Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia (X4) terhadap Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y) **menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.257 (positif)** dan **t hitung 5.816**. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel 1.96 artinya terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia (X4) terhadap Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). Semakin baik persepsi pegawai terhadap Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia (X4) akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). Sehingga hasil hipotesa pengaruh positif dan signifikan **Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia (X4)** terhadap **Kualitas Pengelolaan PNBPN yang tercermin dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y) diterima.**
5. Dari **keempat variabel independen** yang mempengaruhi Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y), pengaruh **terbesar** adalah **variabel X1 yaitu Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN (X1)** dengan **nilai loading factor 0.322**. Variabel independent yang memiliki pengaruh **terkecil** terhadap Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y) adalah **Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT) (X3)** dengan **nilai loading faktor sebesar 0.113**.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan oleh BPK-RI (Tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, lampiran 1), dapat diketahui bahwa, masih ditemukan permasalahan yang masih berulang dari tahun ke tahun, namun demikian, terdapat penurunan dari masalah dan nilai temuannya. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2018 (sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1997 tentang PNBPN), berikut pula peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-undang tersebut, merupakan momentum tepat untuk melakukan manajemen perubahan (*change management*). Dalam hal metode dan cara di mana Kementerian/Lembaga dapat menggambarkan dan menerapkan perubahan baik dalam proses internal dan eksternal. Mengembangkan pendekatan terstruktur terhadap perubahan, untuk dapat membantu memastikan transisi yang mengoptimalkan sambil mengurangi kendala yang dihadapi.

### **Implikasi Penelitian Terhadap Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian, dari responden Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah dikirim dan diterima, terlihat bahwa para responden tersebut telah mengetahui dan memahami dalam pengelolaan PNBPN berdasarkan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2018 tentang PNBPN. Hal tersebut tercermin sebagai berikut:

1. Aspek Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN, meliputi; (a) Fungsi pemungutan PNBPN dan pendekatan penetapan tarif, (b) Obyek, jenis, dan tarif atas jenis PNBPN, dan (c) Pertimbangan penetapan tarif atas jenis PNBPN merupakan tugas dan kewenangan Kementerian/Lembaga (K/L) selaku Instansi Pengelola PNBPN. Kementerian/Lembaga

(K/L) menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBPN kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan melakukan evaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNBPN pada Kementerian/Lembaga (K/L) selaku Instansi Pengelola.

2. Aspek Pengajuan Ijin/Persetujuan Penggunaan Dana PNBPN, meliputi; (a) Kewenangan pihak pengguna dana PNBPN, dan (b) Data dan dokumen untuk penilaian merupakan tugas dan kewenangan Kementerian/Lembaga (K/L) selaku Instansi Pengelola PNBPN. Selanjutnya mengusulkan penggunaan dana PNBPN kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan evaluasi dan menetapkan dana PNBPN tersebut. Dalam melakukan evaluasi atas penggunaan dana PNBPN tersebut, Menteri Keuangan melakukan penilaian atas usulan penggunaan dana PNBPN dengan mempertimbangkan; kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN. Kebijakan fiskal ini, sangat dipengaruhi oleh keterbatasan fiskal yang dimiliki oleh negara, karena adanya *mandatory spending* yaitu belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang.
3. Aspek Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT) meliputi; (a) Efisien, (b) Aman, (c) Sederhana, dan (d) Mudah digunakan, merupakan Variabel independent nilai terkecil/terendah dengan nilai koefisien sebesar 0.113 (positif) dan t hitung 3.974. Semakin baik persepsi pegawai terhadap Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi (Sistem IT) (X3) akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). Hal ini tercermin dari hasil pemeriksaan BPK-RI, bahwa masih terdapat PNBPN terlambat/belum disetor. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan dari aplikasi Simponi yang telah ada.
4. Aspek Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia meliputi; (a) Pengetahuan, (b) Sikap, (c) Keterampilan, dan (d) Komitmen Pimpinan, merupakan Variabel independent nilai terkecil/terendah ke dua dengan nilai koefisien sebesar 0.257 (positif) dan t hitung 5.816. Semakin baik persepsi pegawai terhadap Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia (X4) akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Y). Oleh karena itu, penempatan para pegawai dalam melaksanakan pengelolaan PNBPN di Kementerian/Lembaga (K/L) perlu memperhatikan; integritas, akuntabilitas dan transparansi terhadap peraturan perundang-undangan dan *standard operating prosedur* (SOP). Demikian pula komitmen pimpinan terhadap pengelolaan PNBPN tersebut, sehingga tidak terjadi permasalahan/temuan berulang dari hasil pemeriksaan BPK-RI. Perlu penerapan atas sanksi kepada kementerian/lembaga (institusi) ataupun pegawai yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan, dan diharapkan tidak lagi adanya temuan/permasalahan BPK-RI yang berulang. Beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk Kementerian/Lembaga termasuk Satuan Kerja di bawahnya agar memberikan perhatian pada beberapa hal:

- a. Aspek jenis dan tarif atas Jenis PNBPN agar dilaksanakan sebagai berikut;
  - (1) Fungsi pemungutan PNBPN dan pendekatan penetapan tarif agar dilaksanakan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan dan memperhatikan dasar pertimbangan sebagai berikut:
    - nilai manfaat, kadar atau kualitas dari sumber daya alam,
    - dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya,
    - biaya penyelenggaraan layanan,
    - nilai guna asset tertinggi dan terbaik,
    - aspek keadilan dan/atau,
    - kebijakan pemerintah.
  - (2) Obyek, Jenis, dan Tarif atas Jenis PNBPN untuk pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pelayanan telah diatur dalam Undang-undang, Kontrak, dan/atau peraturan pemerintah, demikian pula untuk pemanfaatan Barang Milik Negara (mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Ditjen Kekayaan Negara – Kementerian Keuangan) dan hak negara lainnya.
  - (3) Pengaturan Tarif dengan Pertimbangan Tertentu, meliputi; (i) tarif bersifat volatile, (ii) tarif dengan kebutuhan mendesak, dan (iii) tarif dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) atau 0% (nol persen). Besaran, persyaratan, dan tatacara pengenaan tarif tersebut terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan sebelum ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.
- b. Aspek persetujuan penggunaan dana PNBPN, merupakan kewenangan dari Kementerian/Lembaga untuk mengusulkannya kepada Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan/atau kebutuhan pendanaan instansi pengelola PNBPN ybs. Usulan penggunaan dana PNBPN telah dilengkapi data dan dokumen yang menggambarkan penggunaan PNBPN dengan mempertimbangkan alokasi antar unit dan ketersediaan anggaran dari sumber dana lain (RM, PHLN, SBSN).
- c. Aspek pemanfaatan sistem informasi teknologi (Sistem IT), perlu dilakukan evaluasi oleh Kementerian/Lembaga untuk memberikan masukan penyempurnaan Sistem Simponi kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Apakah ada kelemahan sistem selama ini untuk penyeteroran yang dilakukan baik oleh Wajib Bayar ataupun Wajib Setor?
- d. Kompetensi/Kualitas Sumber Daya Manusia, perlu Kementerian/ Lembaga dalam menempatkan pegawai untuk pelaksana pengelolaan PNBPN ini memperhatikan dari sisi pengetahuan, sikap dan keterampilan terkait peraturan perundang-undangan dan aplikasi yang sangat berhubungan kelancaran tugasnya. Disamping itu, adanya komitmen pimpinan untuk memastikan setiap pemungutan PNBPN memiliki dasar hukum, mengingatkan agar seluruh PNBPN disetor ke Kas Negara tepat waktunya, dan menggunakan dana PNBPN melalui mekanisme DIPA/APBN.

2. Untuk Direktorat PNBK Kementerian/Lembaga dan Direktorat PNBK Kekayaan Negara Dipisahkan dan Sumber Daya Alam, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan agar:
  - a. Melakukan evaluasi serta penyempurnaan Sistem Simponi yang diterapkan selama ini, terkait dengan masih terdapat permasalahan PNBK terlambat/belum disetor.
  - b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan piutang Kementerian/Lembaga bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
  - c. Melakukan pembinaan kepada seluruh Kementerian/Lembaga melalui peningkatan sosialisasi, *workshop* dan bimbingan teknis agar meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan serta mempertanggungjawabannya pengelolaan PNBK lebih baik.
3. Kerjasama antara Ditjen Anggaran dengan BPPK Kementerian Keuangan untuk melaksanakan program pelatihan pengelolaan PNBK tingkat satuan kerja baik melalui model klasikal ataupun model *e-learning*. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam hal ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Pola pendekatan pelatihannya adalah *Training of Trainer (TOT)* dimana pada tahap awal peserta pelatihan akan dibentuk menjadi *agent of change*. Pada tahap pelatihan selanjutnya para "*agent of change*" Kementerian/Lembaga mendesiminasikan pengetahuannya kepada SDM satuan kerja di lingkungannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penggunaan PNBK yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu.
- Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBK
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

#### Buku

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Aneka Cipta.

Hady, Hamdy, Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi VIII, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriantoro, Nur & Supomo, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (<http://badanbahasakemdikbud.go.id/kbbi/index.php>). Diakses pada 20 Mei 2020.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, D. . 2010. *Uji KHI Kuadrat dan Regresi untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Umar, H. . 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

International Public Sector Accounting Standards Board, *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements*, 2018 Edition Volume 1, IPSAS, copyright September 2018 by IFAC

Prof Mudrajad Kuncoro, Ph.D, Metode Riset untuk bisnis dan ekonomi, edisi 4, 2013.

Roger Hussey, *A Dictionary of Accounting*, oxford Paperback Reference, Oxford University Press, 1999

Syamsuadi, A. (2017). Pelayanan publik dan birokrasi pemerintahan. Diunduh [https://www.researchgate.net/publication/318827945 MEMAHAMI PELAYANAN PUBLIK DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN](https://www.researchgate.net/publication/318827945_MEMAHAMI_PELAYANAN_PUBLIK_DALAM_BIROKRASI_PEMERINTAHAN)

Wikipedia Bahasa Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Optimasi>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020

#### Jurnal/Artikel

Fitrawansah, 2015, *Faktor- faktor yang memengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* ( Studi empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai) dalam laman <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6791/1/Fitrawansah.pdf>. Diakses tanggal 11 Februari 2019

Kartika, Juliani Cahya dan Budiono, Eddy, 2015, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Akuntansi Instansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja*

*Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia), e-Proceeding of Management : Vol.2, No.3 Desember 2015.*

Pujanira, Putriasri dan Taman, Abdullah, 2017, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY*, Jurnal Nominal / Volume VI Nomor 2 / Tahun 2017.